

PERAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN INDONESIA TIMUR: TINJAUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rulinawaty^{1*}, Lukman Samboteng², Joko Tri Brata³, Abdul Rahman⁴,

Andi Wijaya⁵, Rahmat Hidayat⁶

^{1,6} Universitas Terbuka

² Politeknik STIA Lan Makassar

³ Universitas Sulawesi Tenggara

⁴ Politeknik STIA LAN Bandung

⁵ Universitas Muhammadiyah Lampung

*Korespondensi : ruly@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi strategi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang kaya akan warisan budaya dan keanekaragaman hayati. Penelitian ini menganalisis peran administrasi publik dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah ini melalui pendekatan meta-naratif. Dengan mengkaji berbagai literatur, studi ini merangkum temuan utama untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dan praktik administratif memengaruhi inisiatif pariwisata berkelanjutan. Analisis menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif dan kebijakan yang proaktif sangat penting untuk menyelaraskan strategi pariwisata dengan prinsip keberlanjutan. Administrasi publik memiliki peran sentral dalam regulasi, perencanaan, implementasi, dan pemantauan, yang semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Studi ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kerangka kerja administrasi publik guna memastikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi aset lingkungan dan budaya di kawasan Indonesia Timur.

Kata Kunci : Administrasi Publik, Pariwisata Berkelanjutan, Kebijakan Pemerintah, Konservasi Budaya, Indonesia Timur.

ABSTRACT

Sustainable tourism has become a critical strategy for achieving economic and environmental stability, especially in Eastern Indonesia, a region rich in cultural heritage and biodiversity. This study examines the role of public administration in promoting sustainable tourism development in this area using a meta-narrative approach. By synthesizing diverse literature, the research identifies key insights into how government policies and administrative practices impact sustainable tourism initiatives. The findings reveal that effective governance and proactive policymaking are essential for integrating sustainability into tourism strategies. Public administration plays a pivotal role in regulation, planning, policy implementation, and monitoring, all of which contribute to the effective management of natural and cultural resources. This study provides policy recommendations to enhance public administration frameworks, ensuring economic

benefits while safeguarding environmental and cultural assets in Eastern Indonesia.

Keywords : *Public Administration, Sustainable Tourism, Government Policies, Cultural Conservation, Eastern Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki keragaman budaya dan keanekaragaman hayati seperti Indonesia Timur. Wilayah ini, yang mencakup Bali, Komodo, dan Kepulauan Maluku, dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan dengan keindahan alam dan budaya lokal yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun internasional (Huwaie et al., 2020). Namun, pertumbuhan pariwisata yang pesat sering kali menimbulkan tekanan pembangunan yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Kataya, 2020).

Administrasi publik memegang peran penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan melalui regulasi, perencanaan, implementasi kebijakan, dan pemantauan. Peran ini tidak hanya memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan tetapi juga memfasilitasi keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan (Arbolino et al., 2020; Dong & Nguyen, 2022). Sebagai bentuk tata kelola yang efektif, kebijakan pemerintah yang berorientasi keberlanjutan dapat menjadi katalis dalam melindungi warisan budaya dan ekosistem alami sambil mempromosikan manfaat ekonomi jangka panjang (Matei et al., 2021).

Penelitian tentang pariwisata berkelanjutan telah berkembang pesat, tetapi sebagian besar kajian cenderung

berfokus pada konteks global atau wilayah Barat, seperti dampak perubahan iklim dan pariwisata masyarakat adat (Scott, 2021; Lam et al., 2020). Adopsi konsep-konsep tersebut dalam konteks lokal, khususnya Indonesia Timur, masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi multistakeholder (Partelow & Nelson, 2018).

Kajian meta-naratif dalam penelitian ini menyoroti bahwa administrasi publik dapat memainkan peran transformatif melalui penguatan regulasi zonasi, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan wisata (Gesso et al., 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, seperti yang diterapkan di Raja Ampat, mampu meningkatkan keberlanjutan ekowisata melalui kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal (White et al., 2022).

Meskipun telah banyak kebijakan yang dirancang untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kapasitas administrasi publik dan sinergi antar lembaga pemerintah (Ariyani & Fauzi, 2023). Studi ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana strategi tata kelola yang efektif dapat diterapkan di Indonesia Timur, serta bagaimana kebijakan yang dirancang secara proaktif dapat mengintegrasikan keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis peran administrasi publik dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur melalui tinjauan meta-naratif. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan wawasan strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan pembangunan ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan meta-naratif untuk menganalisis peran administrasi publik dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan metodologi dari penelitian yang relevan, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang kompleks (Greenhalgh et al., 2005).

1. Desain Penelitian

Meta-naratif adalah metode yang efektif untuk mereview literatur di bidang yang sedang berkembang atau belum memiliki definisi yang seragam. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis penelitian yang relevan guna mengidentifikasi pola-pola tematik utama yang muncul di berbagai studi. Dengan demikian, metode ini sangat cocok untuk mengkaji bagaimana administrasi publik memengaruhi inisiatif pariwisata berkelanjutan dalam konteks yang beragam (Greenhalgh et al., 2005).

2. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Perencanaan

Pada tahap ini, pertanyaan

penelitian utama dirumuskan, yaitu: *Bagaimana peran administrasi publik dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur?* Selain itu, kriteria inklusi dan eksklusi untuk seleksi literatur ditetapkan guna memastikan relevansi dengan fokus penelitian.

b. Pencarian Literatur

Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis di basis data akademik seperti Taylor & Francis dan ScienceDirect. Kata kunci yang digunakan antara lain "sustainable tourism development," "public administration," dan "Eastern Indonesia." Artikel yang dipilih mencakup periode publikasi dari 2014 hingga 2024 dan harus berupa studi empiris yang fokus pada pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur.

c. Pemetaan dan Evaluasi Literatur

Artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dipetakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen utama, seperti paradigma konseptual, metodologi, dan temuan utama. Validitas dan relevansi artikel dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap isu yang dibahas.

d. Sintesis Tematik

Penelitian yang lolos tahap evaluasi dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci. Sintesis tematik ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran administrasi publik dalam mendukung pariwisata

berkelanjutan.

e. Analisis dan Interpretasi

Data yang telah disintesis dianalisis menggunakan pendekatan naratif untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pemerintah, tata kelola, dan keberlanjutan pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan strategi efektif yang dapat diterapkan di Indonesia Timur.

3. Keandalan dan Validitas

Untuk memastikan keandalan dan validitas, artikel yang diikutsertakan adalah yang telah dipublikasikan di jurnal bereputasi dan sering dikutip oleh peneliti lain. Proses seleksi dilakukan secara berlapis guna meminimalkan bias dan memastikan bahwa hasil penelitian relevan dengan tujuan studi (Greenhalgh et al., 2005; White et al., 2022).

4. Keterbatasan Metode

Pendekatan meta-naratif memiliki keterbatasan, seperti potensi bias dalam seleksi literatur dan ketergantungan pada studi yang telah dipublikasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pengembangan penelitian lebih lanjut melalui studi empiris di lapangan untuk melengkapi temuan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil meta-analisis ini menunjukkan bahwa administrasi publik memainkan peran kunci dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur, terutama melalui regulasi, perencanaan, implementasi kebijakan, dan pemantauan. Temuan utama mencakup tiga area utama berikut:

1. Regulasi untuk Perlindungan Sumber Daya

Administrasi publik di kawasan Indonesia Timur berhasil merancang kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan dan konservasi budaya. Misalnya, implementasi regulasi zonasi di wilayah sensitif seperti Taman Nasional Komodo membantu mengelola dampak lingkungan dari peningkatan kunjungan wisatawan (Lasso & Dahles, 2023). Selain itu, kebijakan konservasi seperti pembatasan jumlah pengunjung di Raja Ampat menjadi contoh sukses upaya perlindungan keanekaragaman hayati (White et al., 2022).

2. Perencanaan Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan

Perencanaan strategis oleh pemerintah daerah menempatkan pariwisata sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi lokal. Di Bali, misalnya, pengelolaan destinasi berbasis komunitas telah meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat lokal (Rosalina et al., 2023). Perencanaan semacam ini mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

3. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu aspek penting adalah mekanisme pemantauan yang memastikan keberlanjutan program. Di wilayah Maluku, administrasi publik telah mengadopsi evaluasi rutin terhadap praktik pengelolaan limbah dan sumber daya air untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut (Huwae et al., 2020).

Tabel 1: Meta Analisis Riset

Aspek	Studi Referensi	Temuan Utama	Dampak	Rekomendasi
Regulasi	Lasso & Dahles (2023); White et al. (2022)	Regulasi zonasi di Komodo; pembatasan pengunjung di Raja Ampat.	Perlindungan ekosistem laut; pengurangan dampak negatif akibat over-tourism.	Mengadopsi regulasi berbasis kapasitas lingkungan, melibatkan ilmuwan lingkungan dalam proses perencanaan.
Perencanaan Strategis	Rosalina et al. (2023); Huwae et al. (2020)	Perencanaan berbasis komunitas di Bali; pengelolaan destinasi di Maluku.	Peningkatan kualitas wisatawan; pertumbuhan ekonomi lokal.	Menyusun rencana strategis yang mengintegrasikan keberlanjutan dengan pelestarian budaya lokal.
Keterlibatan Komunitas	Lasso & Dahles (2023); Partelow & Nelson (2018)	Ekowisata berbasis komunitas di Komodo dan Nusa Tenggara Timur.	Distribusi manfaat yang lebih adil; peningkatan rasa memiliki masyarakat terhadap pelestarian sumber daya.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pariwisata.
Monitoring dan Evaluasi	Huwae et al. (2020); Xu et al. (2022)	Pemantauan keberlanjutan di Maluku; evaluasi dampak pariwisata di Raja Ampat.	Data yang lebih akurat untuk mendukung kebijakan berbasis bukti; adaptasi kebijakan sesuai perubahan kondisi di lapangan.	Membangun sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mengukur keberlanjutan pariwisata secara real-time.
Tantangan	Hampton & Jeyacheya (2015); Erb (2015)	Ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan lokal; birokrasi lambat dan korupsi.	Hambatan pada implementasi kebijakan, terutama di tingkat lokal.	Meningkatkan koordinasi antar-tingkat pemerintahan; menerapkan mekanisme pengawasan antikorupsi yang

Aspek	Studi Referensi	Temuan Utama	Dampak	Rekomendasi
				lebih ketat.

1. Pembahasan

Analisis ini mengungkapkan hubungan erat antara tata kelola yang efektif dan keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur. Peran administrasi publik tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

1) Peran Strategis Administrasi Publik

Administrasi publik di kawasan ini telah menunjukkan kemampuan untuk menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Misalnya, kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) di Raja Ampat telah menghasilkan kawasan konservasi laut yang menjadi model keberhasilan global (White et al., 2022). Selain itu, desentralisasi di Nusa Tenggara Timur memungkinkan pemerintah lokal untuk merancang kebijakan spesifik yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Partelow & Nelson, 2018).

2) Keterlibatan Komunitas Lokal

Keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan pariwisata sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Studi menunjukkan bahwa model ekowisata berbasis komunitas di Komodo telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan distribusi manfaat yang lebih adil (Lasso & Dahles, 2023). Pendekatan ini mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan masyarakat lokal terhadap pelestarian sumber daya alam dan

budaya.

3) Tantangan dan Hambatan

Meskipun ada banyak keberhasilan, penelitian ini juga mencatat beberapa tantangan. Misalnya, korupsi dan birokrasi yang lambat di tingkat lokal dapat menghambat implementasi kebijakan (Hampton & Jeyacheya, 2015). Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan lokal sering kali menciptakan ketegangan dalam pelaksanaan program-program keberlanjutan (Erb, 2015).

4) Rekomendasi Kebijakan

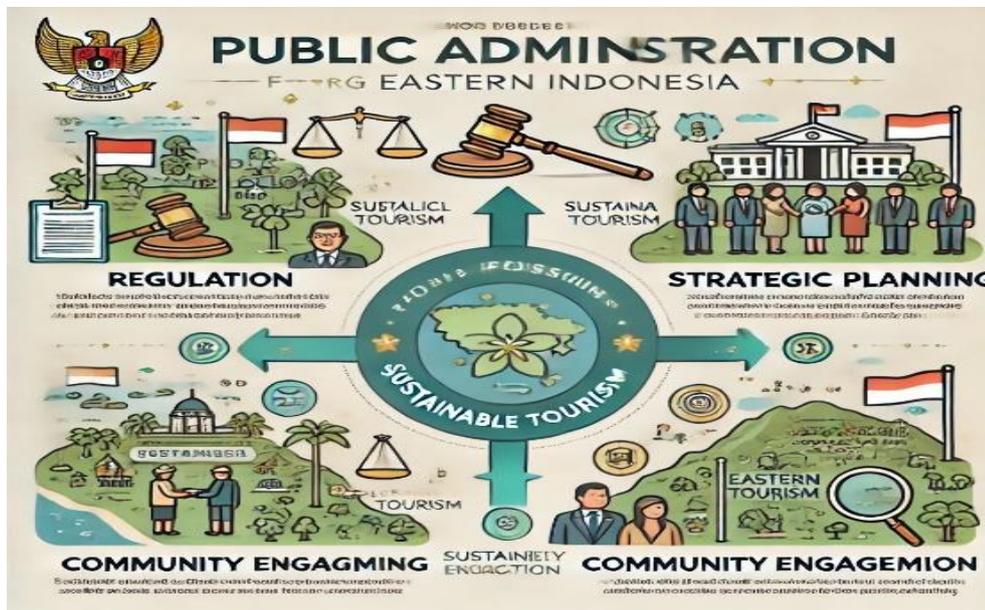
Untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, beberapa rekomendasi disampaikan:

- a. Penguatan Kapasitas Pemerintah Lokal: Memberikan pelatihan dan sumber daya tambahan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pariwisata berkelanjutan (Ariyani & Fauzi, 2023).
- b. Kolaborasi Multistakeholder: Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan keberhasilan jangka panjang (Roxas et al., 2020).
- c. Monitoring dan Adaptasi Kebijakan: Mengembangkan sistem monitoring yang lebih baik untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara berkala dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan (Xu et al., 2022).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran administrasi publik sangat penting dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan yang seimbang antara

pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya. Dengan meningkatkan tata kelola dan membangun kolaborasi yang lebih erat

dengan pemangku kepentingan, Indonesia Timur dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Asia Tenggara.



Gambar 1: Administrasi publik dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi peran administrasi publik dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur melalui pendekatan meta-naratif. Dengan memanfaatkan temuan dari berbagai studi, analisis ini menyoroti bahwa administrasi publik memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya. Fungsi-fungsi kunci administrasi publik—termasuk regulasi, perencanaan strategis, keterlibatan komunitas, serta monitoring dan evaluasi—berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pariwisata berkelanjutan.

Regulasi yang efektif, seperti pembatasan jumlah wisatawan di destinasi sensitif, telah terbukti melindungi keanekaragaman hayati dan meminimalkan dampak negatif pariwisata. Perencanaan strategis yang berbasis komunitas memungkinkan integrasi antara kebutuhan lokal dengan tujuan keberlanjutan global, menghasilkan manfaat ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga kelestarian budaya. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan. Lebih jauh, sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan mendasar yang masih menghambat optimalisasi pariwisata berkelanjutan di wilayah ini. Kesenjangan antara kebijakan nasional dan lokal, lambatnya proses birokrasi, serta korupsi merupakan hambatan yang memerlukan perhatian serius. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta penerapan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kesimpulan dari analisis ini tidak hanya memiliki implikasi praktis bagi pengembangan pariwisata di Indonesia Timur, tetapi juga menawarkan wawasan strategis bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan memadukan kebijakan yang berbasis bukti, kolaborasi multistakeholder, dan pendekatan berbasis komunitas, administrasi publik dapat menjadi katalisator utama dalam memastikan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi pendorong ekonomi, tetapi juga instrumen untuk pelestarian ekologi dan budaya. Penelitian ini menyerukan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris dan interdisipliner untuk memperluas wawasan mengenai dinamika kebijakan publik dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan global.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ariyani, N., & Fauzi, A. (2023). *Pathways toward the transformation of sustainable rural tourism management in Central Java, Indonesia. Sustainability.*

- <https://doi.org/10.3390/su15032592>
Arbolino, R., Boffardi, R., Simone, L., & Ioppolo, G. (2020). *The evaluation of sustainable tourism policymaking: A comparison between multicriteria and multi-objective optimization techniques. Journal of Sustainable Tourism, 29,* 1000–1019. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1843044>
- Dong, X., & Nguyen, T. (2022). *Power, community involvement, and sustainability of tourism destinations. Tourist Studies, 23,* 62–79. <https://doi.org/10.1177/14687976221144335>
- Gesso, C., Lodhi, R., & Cobanoglu, C. (2022). *Local government's role in promoting city hospitality: A meta-ethnography with a public management perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management.* <https://doi.org/10.1108/ijchm-09-2021-1092>
- Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., Kyriakidou, O., & Peacock, R. (2005). *Storylines of research in diffusion of innovation: A meta-narrative approach to systematic review. Social Science & Medicine, 61(2),* 417–430. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.12.001>
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2015). *Power, ownership and tourism in small islands: Evidence from Indonesia. World Development, 70,* 481–495.
- Huwae, V. E., Noermijati, N., Rofiaty, R., & Husein, A. S. (2020). *The*

- mediating role of destination value, tourist satisfaction, and tourist engagement on the relationship between destination image and tourist loyalty in Maluku, Indonesia. Leisure/loisir, 44(4), 587–620.*
- Kataya, A. (2020). *Impact of tourism activities on sustainable community development. Proceedings of the International Conference on Economics and Social Sciences.* <https://doi.org/10.2478/9788395815072-069>
- Lasso, A. H., & Dahles, H. (2023). *A community perspective on local ecotourism development: Lessons from Komodo National Park. Tourism Geographies, 25(2–3), 634–654.*
- Matei, D., Chiriță, V., & Lupchian, M. (2021). *Governance and tourism resilience during the COVID-19 crisis. GeoJournal of Tourism and Geosites.* <https://doi.org/10.30892/GTG.34135-646>
- Partelow, S., & Nelson, K. (2018). *Social networks, collective action, and the evolution of governance for sustainable tourism on the Gili Islands, Indonesia. Marine Policy, 112.*
- Scott, D. (2021). *Sustainable tourism and the grand challenge of climate change. Sustainability.* <https://doi.org/10.3390/su13041966>
- White, C. M., Mangubhai, S., Rumetna, L., & Brooks, C. M. (2022). *The bridging role of non-governmental organizations in the planning, adoption, and management of the marine protected area network in Raja Ampat, Indonesia. Marine Policy, 141, 105095.*
- Xu, B., Abukhalifeh, A., Lu, X., Gao, B., Cui, H., & Wu, Y. (2022). *Rural tourism public service performance evaluation based on analytic hierarchy process. Mathematical Problems in Engineering.* <https://doi.org/10.1155/2022/4189862>